

Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah pada pertanyaan yang dihadapi oleh setiap orang, yaitu kepentingan manakah yang harus saya utamakan. Kepentingan saya selaku kepentingan individu atau kepentingan masyarakat selaku tempat saya tinggal bersama?

Persoalan pengutamaan kepentingan apakah individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang saling bertolak belakang. Kedua pandangan ini justru berkembang menjadi paham atau aliran bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat.

1. Pandangan individualisme

Individualisme berpangkal dari konsep dasar ontologis bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Paham ini memandang manusia sebagai makhluk pribadi yang utuh dan lengkap terlepas dari manusia yang lain. Manusia sebagai individu adalah bebas, karena itu ia memiliki hak-hak yang tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Apabila hak-hak itu terpenuhi maka kehidupan manusia akan terjamin dan bahagia. Masyarakat hanyalah kumpulan dari individu-individu. Jika individu-individu itu hidupnya bahagia dan sejahtera maka masyarakat pun akan sejahtera. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individual yang harus diutamakan.

Kesejahteraan individu merupakan nilai kebaikan yang tinggi yang harus diperjuangkan melalui persamaan dan kebebasan. Individualisme adalah sentral kebebasan seorang individu untuk merealisasikan dirinya.

Paham individualisme menghasilkan ideologi liberalisme. Paham ini bias disebut juga ideologi individualisme liberal. Liberalisme berasal dari kata liber artinya bebas atau merdeka. Liberalisme adalah suatu paham yang ditegakkannya kebebasan setiap individu serta memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak-hak miliknya. Liberalisme menolak segala pengekangan terhadap individu. Liberalisme memberi kebebasan manusia untuk beraktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Beberapa prinsip yang dikembangkan ideologi liberalisme adalah sebagai berikut :

- a. Penjaminan hak milik perorangan. Menurut paham ini, pemilihan sepenuhnya berada pada pribadi dan tidak berlaku hak milik berfungsi sosial.
- b. Mementingkan diri sendiri atau kepentingan individu yang bersangkutan. Prinsip ini juga mengandung pengertian membiarkan setiap orang untuk melakukan setiap aktivitas untuk kepentingan sendiri. Pemenuhan akan kepentingan sendiri-sendiri diyakini akan membawa kemakmuran bersama.
- c. Pemberian kebebasan penuh pada individu. Individu adalah primer, sedangkan masyarakat adalah sekunder. Bila individu mendapat kebebasan dan kepuasan maka masyarakat akan mendapat kemakmuran.
- d. Persaingan bebas untuk mencapai kepentingannya masing-masing.

Liberalisme dalam bidang politik menghasilkan demokrasi politik, kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan perlunya jaminan hak asasi manusia.

Liberalisme dalam bidang ekonomi menghasilkan kapitalisme dan pasar bebas.

Sedangkan liberalisme dalam bidang sosial budaya adalah kebebasan individu untuk mengekspresikan sikap, perilaku, seni, dan budayanya, melahirkan manusia

yang berbudaya. Kebebasan dalam rangka pemenuhan kebutuhan diri bisa menimbulkan persaingan dan dinamika kebebasan antar individu, menurut paham liberalisme, kebebasan antar individu tersebut bisa diatur melalui penerapan hukum jadi, negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum mutlak diperlukan dalam rangka mengelola kebebasan agar tetap menciptakan tertibnya penyelenggaraan hidup bersama.

2. Pandangan sosialisme

Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Masyarakat tidak sekedar kumpulan individu. Masyarakat merupakan entitas yang besar dan berdiri sendiri dimana individu-individu berada. Individu dan dianggap dari sebagai alat dari mesin raksasa masyarakat. Kedudukan individu hanyalah objek dari masyarakat.

Menurut pandangan sosialis, hak-hak individu sebagai hak dasar hilang. Hak-hak individu timbul karena keanggotaannya dalam suatu komunitas atau kelompok. Individu terikat pada komitmen suatu kelompok. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pandangan sosialisme bertolak belakang dengan pandangan individualisme. Sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Bahwa kepentingan masyarakatlah yang utama, bukan individu.

Sosialisme adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera bebas dari penguasaan individu atas hak milik. Dalam sejarahnya, sosialisme muncul sebagai reaksi atas paham individualisme liberalisme. Kebebasan individu yang diyakini dapat memaksimalkan pemenuhan kesejahteraan ternyata banyak menimbulkan ketidakadilan antar individu itu sendiri. Individu yang memiliki kemampuan bisa sejahtera, tetapi individu yang tidak mampu akan tetap miskin dan semakin tertinggal, dengan demikian, dalam masyarakat timbul ketidakadilan dan kesenjangan. Kelompok masyarakat seperti anak-anak, wanita, buruh, para pekerja hanya dieksploitasi oleh orang-orang yang mampu, terutama yang menguasai hak milik dan alat produksi dalam suatu masyarakat. Sosialisme muncul dengan maksud kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama yang tertinggal oleh sistem liberalisme, mendapat keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan. Untuk meraih hal tersebut, sosialisme berpandangan bahwa hak-hak individu harus diletakkan dalam kerangka kepentingan masyarakat yang lebih luas. Masyarakat yang lebih penting dari individu.

Dalam sosialisme yang radikal/ekstrem cara untuk meraih hal itu adalah dengan menghilangkan hak pemilikan dan penguasaan alat-alat produksi perorangan. Paham individualisme liberal dan sosialisme sama-sama tumbuh di Eropa Barat pada abad ke-18-19. Individualisme dipelopori oleh para tokoh, antara lain Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, dan Montesquieu, sedangkan pemikiran sosialis ditokohi oleh Robert Owen dari Inggris (1771-1858), Louis Blanc, dan Proudhon, ideologi marxisme termasuk dalam varian sosialisme, Ajaran marxisme dipelopori oleh Karl Marx (1818-1883). Paham individualisme liberal dan sosialisme saling bertolak belakang dalam memandang hakikat manusia. Dalam Declaration of Independence Amerika Serikat 1776, orientasinya lebih ditekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk individu yang bebas merdeka, tidak seorang pun berhak untuk mencampuri hal pribadinya. Manusia adalah pribadi yang memiliki harkat dan martabat yang luhur. Sedangkan dalam Manifesto

komunikasi karl marx dan engels, orientasinya sangat menekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial semata.

Menurut paham ini, manusia sebagai makhluk pribadi tidak dihargai. Pribadi dikorbankan untuk kepentingan negara. Lalu, bagaimana kita memposisikan diri atas kedua pandangan tersebut? Kepentingan manakah yang harus diutamakan, kepentingan diri (privat) atau kepentingan masyarakat (publik)? Pilihan hal tersebut sesungguhnya secara filosofi dapat kita kembalikan kepada kedua pilihan dari ideologi tersebut di atas.

Jika kita simak lebih jauh, kedua pandangan di atas mengidap kelemahannya masing-masing. Kebebasan perseorangan yang merupakan inti dari ajaran individualisme liberal dalam pelaksanaannya justru mengingkari ajarannya sendiri, yaitu persamaan. Individualisme liberal dapat menimbulkan ketidakadilan, berbagai bentuk tindakan tidak manusiawi, imperialisme, dan kolonialisme baik dalam bentuk lama maupun baru. Persaingan bebas akan memunculkan kesenjangan antara kaya dengan orang miskin.

Liberalisme mungkin membawa manfaat bagi kehidupan politik, tetapi tidak dalam lapangan ekonomi dan sosial. Sosialisme dalam bentuk yang ekstrim (marxisme/komunisme), tidak menghargai manusia sebagai pribadi sehingga bisa merendahkan sisi kemanusiaan, dalam negara komunis, mungkin terjadi kemakmuran masyarakat, tetapi kepuasan rohani manusia belum tentu terjamin. Negara komunis mudah menjadi negara otoriter yang memasung hak-hak dasar manusia maupun warga negara.

Dalam negara Indonesia yang berfalsafahkan Pancasila, hakikat manusia dipandang memiliki sifat pribadi sekaligus sosial secara seimbang. Menurut pandangan filsafat Pancasila, manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hal ini tidak sekedar menggabungkan dua pandangan (individualisme dan sosialisme) di atas, tetapi secara hakikat bahwa kedudukan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sekali lagi, manusia bukanlah makhluk individu dan sosial. Tetapi manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Frans Magnis Suseno, (2001) menyatakan bahwa manusia adalah individu yang secara hakiki bersifat sosial dan sebagai individu manusia bermasyarakat. Bung Karno menerangkan tentang seimbangannya dua sifat tersebut dengan ungkapan "internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sari internasionalisme" (risalah sidang BPUPKI-PPKI, 1998) paduan harmoni antara individu dan sosial dalam diri bangsa Indonesia diungkapkan dalam sila kedua mengungkapkan penghargaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat luhur, karena itu harus dihargai dan dijunjung tinggi, konkretisasi atas hal tersebut adalah adanya jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Sila ketiga mengungkapkan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang perlu untuk diperjuangkan dan dilestarikan. Bangsa Indonesia memiliki prinsip menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Namun demi kepentingan bersama tidak dengan mengorbankan hak-hak dasar setiap warga negara.

Kesimpulan dilema kepentingan individu dan kepentingan masyarakat ditemui, manusia adalah masa depan bagi manusia. Artinya antara kepentingan individu dan kepentingan umum adalah dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Manusia pribadi

hanya pada kaum pygmis yang hidup dan bergantung pada alam, karena tidak dapat hidup di alam lain. Ibarat spesies yang hidup dalam suatu ekosistem tertentu. Bila dipindahkan pada alam lainnya tidak sesuai ia akan mati. Manusia adalah masa depan bagi manusia, memiliki implikasi terhadap manusia sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk social yang hidup tidak untuk dirinya, karena di dalam dirinya ada diri orang lain. Ada hak asasi pribadi dan kewajiban asasi yang merupakan equilibrium yang sempurna. Hakekat asasi yang pribadi tercermin dalam manusia individu yang disebut sebagai individu yang berketuhanan. Individu yang memiliki pengalaman secara pribadi dan hirarkis dengan tuhan, adalah manusia beriman dan hidup dalam norma serta tata aturan secara social untuk mewujudkan iman, manusia adalah individu yang beragama.